

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

1. Bidang Pendidikan:

Kebijakan umum dalam proses pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan secara merata

2. Bidang Kesehatan:

Kebijakan umum dalam proses pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara merata

3. Bidang Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang diarahkan untuk;

1. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan menuju perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka meningkatkan konektivitas menuju kota Sintang serta meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Mengembangkan sistem transportasi multi moda dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.
4. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.

4. Bidang Politik, Ketertiban dan Ketentraman:

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta memfungsikan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, pejabat struktural dan fungsional yang terkait dengan penegakan peraturan daerah guna mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib dan aman dalam masyarakat.
2. Menyusun sistem pembinaan penegakan peraturan daerah/keputusan bupati yang efektif dan efisien dalam bentuk petunjuk pelaksanaan/teknis operasional dilapangan.

3. Turut serta menjaga dan melindungi upaya tindakan hukum segenap aparat penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menindak lanjuti solusi-solusi penegakan peraturan daerah.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, pendidikan dan pelatihan kebencanaan berbasis masyarakat. yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
6. Peningkatan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi.
8. Meningkatkan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat dan meminimalisir berbagai bentuk penyakit masyarakat serta konflik sosial.

5. Bidang Sosial

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia, melalui kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan pendidikan agama, pembinaan dan kerukunan hidup beragama.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka sinergi pembangunan antar pemangku kepentingan pembangunan.
3. Membangun kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran serta dan prestasi pemuda, keolahragaan serta pelestarian seni dan budaya lokal.

6. Bidang Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran secara terpadu dengan menata, memanfaatkan, mengembangkan, memelihara, memulihkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

7. Bidang tenaga kerja

Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja

8. Bidang Pengendalian penduduk dan KB

Kebijakan umum di bidang Pengendalian Penduduk adalah Peningkatan Cakupan Pemakaian Kontrasepsi dan Pemerataan Persebaran Penduduk.

9. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Meningkatkan ketahanan pangan dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal.

10. Bidang Ekonomi

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (**Misi-5**), maka peningkatan ekonomi dan investasi difokuskan pada kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
2. Optimalisasi strategi perencanaan dengan mengembangkan kawasan sebagai simpul pertumbuhan.
3. Pengembangan Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif dan kewirausahaan masyarakat.
4. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi pasar/ persaingan bebas.
5. Peningkatan iklim usaha yang memberi kepastian berusaha dan kesempatan berusaha.
6. Pengembangan dan penguatan sumber daya dalam mendorong pembangunan sektor industri.
7. Peningkatan peran serta industri kecil dan menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.
8. Pengembangan sistem kota dengan memantapkan fungsi sebagai wilayah pengembangan dan pembangunan.
9. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan potensi ekonomi.
10. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk latihan ketrampilan.
12. Revitalisasi jaringan distribusi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
13. Perluasan jaringan dan penyebaran informasi perdagangan/bisnis.
14. Pengembangan daya saing dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.
15. Pengembangan promosi investasi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.

11. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien.
2. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah).
3. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (*trust*) dunia usaha dan masyarakat.

4. Penegakan kepastian pelaksanaan regulasi daerah.
5. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
6. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi pembangunan dan pemerintahan yang transparan, cepat, dan akuntabel.
7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik.
8. Penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

7.2. Program Prioritas

1. Bidang Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Bidang Kesehatan

1. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
2. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3. Bidang Infrastruktur:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Program Pengembangandan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
4. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
5. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Talud/Bronjong
6. Program Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan

7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8. Program Legalitas Tata Ruang;
9. Program Perencanaan Tata Ruang
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

4. Bidang tenaga kerja:

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Program Bursa Kerja Online
3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Perlindungan Ketenagakerjaan

5. Bidang Pengendalian penduduk dan KB:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

6. Bidang Lingkungan Hidup:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran

7. Bidang pangan dan pertanian:

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
4. Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian/perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
6. Program Pembangunan Perkebunan

8. Bidang Perencanaan Pembangunan :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif pada UMKM

11. Bidang Penanaman Modal Daerah:

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

12. Bidang Perdagangan:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

13. Bidang Perindustrian:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

14. Program Bidang Sosial Budaya

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Penataan Kawasan Budaya
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Pengembangan Nilai Budaya
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15. Program Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
7. Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah



16. Program Bidang Politik, Ketertiban dan Kententraman:

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tabel 7.1. Keterkaitan Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR CAPAIAN				PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatkan angka melek huruf.	1 Menurunkan angka buta huruf mendekati nol.	Angka melek huruf	%	88,69	93,92	Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Dikbud
		Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jiwa	232.337	239.014			
2 Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun.	2 Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun.	APS D/MI	%	97,35	99,15	Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud
		APS MP/MTs	%	53,84	78,84			
		APK D/MI	%	122,36	122,42			
		APK MP/ MTs	%	101,35	101,41			
		APM D/MI	%	96,29	100			
		APM MP/ MTs	%	74,4	83,58			
		ARLB	Tahun	6,63	8			
		APT	%	4,7	6,2			
		APuS D/MI	%	0,23	0			
		APuS MP/MTs	%	0,41	0,15			
		AL D/MI	%	100	100			
		AL MP/ MTs	%	99,97	100			
		AM D/MI	%	85,93	100			
		AM MP/ MTs	%	74,01	100			
	3 Meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah.	APM MA/MA				Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Dikbud
	4 Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	3.287	6.816		Pendidikan	Dinas Dikbud
	5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.	Ratio Ketersediaan Sekolah SD	0	0,13	0,13	Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Dikbud
		Ratio Ketersediaan Sekolah SMP	0	0,38	0,25			
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	13,65	75			
		Sekolah pendidikan MP/MTs kondisi bangunan baik	%	22,28	80			
3 Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat.	Peningkatan budaya dan minat baca masyarakat	Jumlah perpustakaan	Unit	66	66	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan / TBM Mobile	Perpustakaan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
		Jumlah Pengunjung	Org	1.642	2.751			
		Jumlah Buku Yang Tersedia	Eks	22.023	31.636			
4 Meningkatnya nilai budaya lokal.	6 Pengembangan Nilai Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah grup kesenian	Grup	32	40	Pengembangan Nilai Budaya	Budaya	Dinas Dikbud
		Jumlah gedung kesenian	Unit	2	5	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Budaya	Dinas Dikbud

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	2	2	Penataan Kawasan Budaya	Budaya	Dinas Dikbud
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	2	10			
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	15	15			
		Jumlah Organisasi Kebudayaan	buah	7	15			
5 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.	7 Pengembangan pendidikan informal.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	%	49,7	80	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Dikbud
	8 Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin	Beasiswa Siswa Miskin	Siswa			Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Dikbud
6 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin.	9 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,95	72,45	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka kelangsungan hidup bayi	Per 100 kh	970	980	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,49	95			
		Persentase balita gizi buruk	%	2,96	2			
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100			
		Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	0,96	1,25			
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	79,12	100			
	Cakupan kunjungan bayi	%	77,41	90				
	10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60,07	90	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 Peningkatan layanan Kesehatan Penduduk Miskin.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	16,64	30	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	12 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	75,47	85	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.	Peningkatan Klasifikasi RSUD Ade M. Djoen	Tipe	Tipe C	Tipe B	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rs/rs Jiwa	Kesehatan	RSUD Ade M. Djoen
		Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Tipe	Dasar	Paripurna			
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	19,68	22,7	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	0,76	1,26			
		Cakupan Puskesmas	%	38,34	75			
		Cakupan Puskesmas Pembantu	%	68,83	80			
7 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.	14 Peningkatan Kualitas Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	2,9	2,5	Program Keluarga Berencana	KB dan KS	BKBPPPA
		Rasio akseptor KB	%	73,24	76,1	Program Pelayanan Kontrasepsi	KB dan KS	BKBPPPA
		Cakupan peserta KB aktif	Aseptor	53392	56392			
8 Meningkatnya budaya olahraga untuk mendukung pola hidup sehat.	15 Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya berolahraga.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	19659	19119			
		Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	30	50	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Disporaparekraf
	16 Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga.	Jumlah Klub Olahraga	Klub	408	458	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Disporaparekraf
		Jumlah organisasi olahraga	organisasi	43	53			
	17 Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	18	28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas PU
		Lapangan olahraga	Buah	408	458			
9 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.	18 Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	25,92%	60,18%	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Banyaknya Jembatan Rangka Baja	%	9,8	37,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Panjang jalan dilalui Roda 4	%	91,14	100			
		Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	17,32	22,78	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang	%	90,2	62,5			
		Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	4,49	7,96	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	%	91,3		Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
	19 Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org	526972	593.456	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dishubkominfo
		Jumlah Izin Trayek	Trayek	72	75			
		Jumlah Uji KIR Angkutan umum	Unit	83	104			
		Angkutan Darat	Unit	359	374			
		Kepemilikan KIR angkutan umum	%	34	43			
		Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5			
		Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	526972	593.456			
		Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Org	526972	593.456			
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3;1;5		Pembangunan Sapras Perhubungan	Perhubungan	Dishubkominfo
		Pemasangan Rambu-rambu	%	44,27	95	Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Perhubungan	Dishubkominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.	20 Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air.	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	48,67	50,89	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik\	Ha	5.156	5.391			
11 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	21 Pengembangan perumahan dan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak.	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	4,5	6,6	Pembangunan Sarana/Prasarana serta Fasilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman	Perumahan	Dinas PU
		Persentase Penduduk berakses air minum = 4,5 %				Penyediaan dan pengelolaan air baku	Perumahan	Dinas PU
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0	0,34	0,31	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	DKPPK
		Persentase penanganan sampah	%	60	85			
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	M3	910	1.062			
		Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30	30	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	DKPPK
12 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.	22 Peningkatan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.	Rumah tangga pengguna listrik	%	54,16	86,1		Hibah	Belanja Tak Langsung
13 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	23 Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Prushaan	11	46	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
	24 Peningkatan upaya penegakan hukum Lingkungan Hidup.	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	20	14	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BLH
		Pencemaran status mutu air (14 Sungai	Status Kondisi	buruk sekali	Baik			
14 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRWK.	25 Peningkatan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	%	90	100	Legalitas Perda Tata Ruang	Tata Ruang	Dinas PU
		Luas wilayah produktif	Ha	817.018	1.127.018	Perencanaan Tata Ruang	Tata Ruang	Dinas PU
		Luas wilayah industri	Ha	870.664	1.070.664			
		Luas wilayah perkotaan	Ha	136.397	303.397			
15 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	26 Meningkatkan fasilitas (sarana prasarana) keagamaan.	Rasio tempat ibadah per 100.000 satuan penduduk	Buah	4	4,25		Hibah	SETDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan	Pemahaman agama pemeluk agama	Nilai	Baik	Baik			
16 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.	28 Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. 29 Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan harmonisasi masyarakat Kabupaten Sintang.	Toleransi antara pemeluk Agama	Nilai	Baik	Baik	Pendidikan Politik Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	KESBANGPOL
17 Meningkatnya perekonomian daerah.	30 Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah = 29 jenis	Jenis	29	29	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah	Dispenda
18 Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan daerah.	31 Penyederhanaan regulasi dan tarif pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha = 1 perda	Perda	1	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BPMPSTP
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) = 195 Buah	Buah	195	241			
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) = Rp 1.349,13 M	Milyar Rp	1349,13	1.763,40			
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) =250 M	TK	175	175			
		Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	41	42	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPMPSTP
		Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Unit	6	6			
		Jenis, kelas, dan jumlah	Unit	357	492			
		Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	352	367			
		Jumlah BPR/LKM	Unit	4	5			
		Lama proses perijinan						
		SIUP	Hari	5	5			
		TDP	Hari	5	5			
		IUI	Hari	14	14			
		TDI	Hari	5	5			
		IMB	Hari	21	21			
		HO	hari	5	5			
		Penduduk yg Bekerja	%	66	85	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	95,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	79,04	92,6				
		Rasio daya serap tenaga kerja	TK	175	240				
		Pencari kerja yang ditempatkan	jiwa	124	191	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans	
		Tingkat pengangguran terbuka	%	3,06	2,99	Program Bursa Kerja Online	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans	
		Rasio lulusan S1/S2/S3	%	77	98	Program Perlindungan Ketengakerjaan	Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans	
		Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	100				
19	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.	Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi produk unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,03	10,75	Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Industri	Disperindagkopukm
			Pertumbuhan Industri	%	2,58	3,15			
			Jumlah industri kecil menengah = 203 Unit	Unit	203	410			
			Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kelompok	12	136			
20	Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.	Pengembangan kawasan pedesaan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi berbasis unggulan daerah	Jumlah Pasar = 3 Buah	Buah	3	16	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Disperindagkopukm
			Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	17,6	18,15			
21	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.	Meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memiliki daya saing	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal = 30 Kelompok	Kelompok	30	55	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Disperindagkopukm
			35	Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	192270	193920	Pencapaian iklim usaha yang kondusif pada UMKM
	Persentase koperasi aktif	%			69,23	72,37			
	22	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan perikanan dan perkebunan berbasiskan sumber daya daerah	Nilai tukar petani	Poin	98	103	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pertanian
Produksi Padi				Ton/Thn	74398	93.608			
Produksi Jagung				Ton/Thn	2849	3.621			
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB				%	26,46	29	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pertanian	Dishutbun
Produktifitas Karet				Ton/Thn	47129	63.158			
Produktifitas Kelapa Sawit				Ton/Thn	908654	1.609.735			
Produktifitas Lada				Ton/Thn	507	1.633			
Tingkat Penggunaan Benih Unggul Karet				%	60	90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9							
		Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit	%	20	80										
		Produktifitas Kakao	Ton/Thn	8,3	36										
		Produktifitas Kopi	Ton/Thn	99	120										
		Produksi peternakan (daging)	Ton/Thn	4.333	7.675										
		Produksi perikanan	Ton/Thn	1.776	2.119	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan							
		Luas Kebun				Program pengembangan budidaya perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan							
						Program Pembangunan Perkebunan	Pertanian	Dishutbun							
			Luas Kebun Karet	Ha	90.310	96.935									
			Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	144.852	256.614									
			Luas Kebun Lada	Ha	1.012	2.112									
			Luas Kebun Kakao	Ha	125	625									
			Luas Kebun Kopi	Ha	100	600									
			Regulasi ketahanan pangan	Peraturan	1	2				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	BP4KKP			
		Ketersediaan pangan utama	%	97	100										
		Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	50	100										
		Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	55	100										
		Desa Mandiri Pangan (diintervensi bantuan Pemerintah)	Desa	13	16										
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	75,9	100										
		23	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah.	37	Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, professional, dan memiliki integritas.	Rasio guru/ murid SD/MI = 1:29	0	1:29	1:20				Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah	BKD
		24	Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daeah			Rasio guru/ murid MP/Mts = 1:20	0	1:20	1:15						
Rasio dokter per satuan penduduk = 7,57 %	Per 100 ribu pddk					18,42	28								
Rasio tenaga medis per satuan penduduk = 109,49 /100.000 pddk	Per 100 ribu pddk					177,35	206,01								
25	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	38	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Nilai	Ya	Ya	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi Daerah	BPKAD					
	Opini WTP dari BPK			Nilai	Ya	Ya									

1		2		3		4	5	6	7		8	9
26	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	39	Peningkatan Pengawasan internal.	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pemeriksaan	%	75	95		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Otonomi Daerah	Inspektorat Kabupaten
				Prosentase Temuan Hasil Pemeriksanaan yang selesai ditindaklanjuti	%	31	95					
	40	Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.	Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	4.424.045	5.024.045	Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Otonomi Daerah	SETDA		
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0	34,22	43,6						
			Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	M2	4.424.045	5.024.045						
			Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	M2	18.050.506	20.450.506						
			Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Kasus	10	70						
			Penyelesaian izin lokasi baru	Izin lokasi	28	38						
			Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Izin lokasi	4	37						
			Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	208.237	344.317					Program Penataan Administrasi Kependudukan	
			Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	170.688	302.864						
			Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	260.735	331.860						
			Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	1.672	6.457						
			Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	3.052	13.102						
			Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	-	20.000						
			Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Unit	-	1						
			Ketersediaan sarana pelayanan langsung (direct service)	Unit	-	2						
			Sosialisasi dan pembinaan masyarakat	Keg	2	15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.845	3.943	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan	BKBPPPA
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	188	368			
		Rasio KDRT	Kasus	17	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	BKBPPPA
		Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Orng	3.816	5.016			
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	22	4			
		Persentase Jumlah Penduduk miskin	%	9,11	7,21	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsosnakertrans
		Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Panti Asuhan	7	9			
		PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	97	399	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertrans
		Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Jiwa	50	159			
		Jumlah organisasi pemuda	organisasi	43	70	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Olahraga dan Pemuda	Disporaparekraf
		Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	40	70			
		Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Buah	4	10			
		Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	unit	1	1	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Otonomi Daerah	BPMPSTP
		Penegakan PERDA	Perda	44	58	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Satpol PP dan Linmas
		Cakupan patroli petugas Satpol PP	Orang	226	439			
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	70	85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Orang	4070	4150			
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	WMK	1	4	Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Linupgkungan Hidup	DKPPK
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	28	15			
		Sistim Informasi Manajemen Pemda	Unit	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah	BPKAD
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah	Buku	12	20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
		Dokumen Data Neraca Wilayah Kabupaten Sintang	Buku	1	7			
		Pengelolaan arsip secara baku	%	70	95	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Kantor Arsip dan Perpustakaan
		Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	%	95	95			
		Jumlah jaringan komunikasi	Buah	108	131	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
		Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,001000403	0,0010004			
		Jumlah surat kabar nasional/lokal	Buah	10	20			
		Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Unit	6	11			
		Web site milik pemerintah daerah	ada	17	27			
		Pameran/expo	ada	1	3			
		Jumlah Penertiban PETI	Lokasi	55	46	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Pertambangan	Distamben
		Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	8,38	10,21			
		Kunjungan wisata	Orang	813	5198	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Disporaparekraf

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	200 jt	226 jt					
27	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.	41	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	86	130	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Kesbangpol
			Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	1120	2530				
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	86	107				
28	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.	42	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Ratio	0,71	1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik DN	Satpol PP dan Linmas
				Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	40,7	60			
					Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik DN
29	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.	43	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	65	85		ADD	Belanja Tak Langsung
30	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.	44	Meningkatkan kapasitas Aparat Desa dan BPD dalam Tata Kelola Pemerintahan desa.	Aparat Desa dan BPD yang telah mengikuti Manajemen Desa	%	75	100	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		45	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak	407	407	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Jumlah LPM	kelompok	7	9			
				PKK aktif	Tim Rak	407	407			
				Posyandu aktif	bUAH	375	391			

7.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

7.3.1. Arah Kebijakan Pembentukan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pembentukan struktur ruang Kabupaten Sintang diarahkan untuk mewujudkan pusat-pusat kegiatan, dan sistem prasarana wilayah yang meliputi; pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk pengembangan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

- A. Pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

A.1. Perwujudan Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL& PPK)

Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL& PPK) di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a1. Pemantapan status Sistem Pusat Kegiatan yang terdiri dari PKW, PKSN, PKL dan PPK

- a2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan (PKW, PKSN, PKL& PPK), meliputi:

- Kawasan Perkotaan fungsi PKW: Kawasan Perkotaan Sintang;
- Kawasan Perkotaan fungsi PKSN: Kawasan Perkotaan Kota Jasa;
- Kawasan Perkotaan fungsi PKL, pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - 1) Nanga Serawai di Kecamatan Serawai,
 - 2) Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir,
 - 3) Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk,
 - 4) Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah,
 - 5) Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terdapat di Kelurahan Kapuas Kanan Hilir di Kecamatan Sintang, Desa Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak serta Desa Sungai Ukoi di Kecamatan Sungai Tebelian.
- Kawasan Perkotaan fungsi PPK, pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - 1) Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - 2) Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - 3) Binjai di Kecamatan Binjai Hulu;
 - 4) Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak;
 - 5) Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian;
 - 6) Dedai di Kecamatan Dedai;
 - 7) Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu;
 - 8) Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - 9) Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.

- a3. Penetapan Status Hukum RTR Kawasan Pusat Kegiatan yang terdiri dari PKW, PKSN, PKL dan PPK, meliputi:

- Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR Kawasan Perkotaan Sintang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR Kawasan Perkotaan Kota Jasa
 - Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR PKL pada Kawasan Perkotaan Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai, serta Sungai Ringin.
 - Peraturan Daerah Kabupaten untuk RTR PPK, pada Kawasan Perkotaan Senaning, Nanga Ketungau, Binjai, Nanga Tempunak, Sungai Ukoi, Dedai, Nanga Tebidah, Kelam dan Nanga Kemangai.
- a4. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah/seluruh kabupaten seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
 - Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type A dan B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam propinsi.
 - Penguatan identitas kota berfungsi PKW yang berjati diri budaya dayak (Sintang).
- a5. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), meliputi:
- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah/seluruh kabupaten seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
 - Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type A dan B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam propinsi.
 - Penguatan identitas kota berfungsi PKSN yang berjati diri budaya dayak (Sintang).
- a6. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
 - Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kabupaten/beberapa kecamatan: Terminal Type B, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kabupaten atau dalam propinsi.
 - Penguatan identitas kota berfungsi PKL yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a7. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Pusat Pelayanan Kegiatan (PPL) meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kegiatan sosial ekonomi skala wilayah kecamatan beberapa desa seperti: pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.
- Pemantapan pelayanan simpul transportasi skala wilayah kecamatan beberapa desa: Terminal Type C, serta kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang antar wilayah dalam kecamatan atau dalam kabupaten.
- Penguatan identitas kota berfungsi PPK yang berjati diri budaya dayak (Sintang).

a8. Perwujudan fungsi-fungsi kegiatan pendukung Kawasan Agropolitan, sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perdesaan yang terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan, meliputi:

- Pemantapan dan pengembangan prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/ pengairan, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- Pengembangan sistem perijinan yang mudah, cepat dan murah guna mendukung perkembangan agribisnis berskala nasional bahkan internasional

B. Pengembangan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;

1. sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
2. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
3. sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
5. sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
6. sistem jaringan prasarana lainnya.

Indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana utama di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat di wilayah Kabupaten

- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan jaringan jalan nasional dan propinsi yang telah ada.
- Pengembangan jaringan ruas-ruas jalan baru yang berfungsi jalan nasional dan propinsi terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.

- Pengembangan Terminal Type A di S. Uko i dan penataan sistem pelayanan terminal lainnya.
 - Penataan sistem trayek angkutan umum antar kota dan dalam kota.
 - Pengembangan angkutan umum massal terdiri dari kegiatan feasibility studi, uji coba, penataan jalur khusus angkutan umum, replikasi pada beberapa trayek.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Sungai di wilayah Kabupaten
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungaidi Sungai Kapuas;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Melawi;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di Sungai Ketungau;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di S. Serawai;
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di S. Kayan; dan
 - Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan lalu lintas dan angkutan sungai di S. Ambalau.
 - Pemantapan dan pengembangan alur pelayaran transportasi sungai lokal pada alur (1) Sintang – Nanga Pinoh; (2) Nanga Pinoh - Serawai; (3) Serawai – Ambalau; (4) Sintang – Nanga Mau.
 - Pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang.
 - Pemantapan dan pengembangan prasarana transportasi sungai, pada dermaga-dermaga berikut:
 - 1) Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang
 - 2) Dermaga Sungai Ringin di Kecamatan Sintang
 - 3) Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai
 - 4) Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau
 - 5) Dermaga Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah
 - 6) Dermaga Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu.
 - Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari:
 - 1) Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir.
 - 2) *Steger* Sungai Ana di Kecamatan Sintang.
 - 3) Pelabuhan khusus angkutan sungai untuk swasta.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapiandi wilayah Kabupaten
- Pemantapan dan pengembangan pelayanan jaringan jalur kereta api yang telah ada.
 - Pengembangan jaringan ruas-ruas jalur kereta api baru terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Jalur yang akan dikembangkan propinsi Kalimantan Barat adalah jalur

- yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau
- Pemantapan dan pengembangan stasiun kereta api dan penataan pelayanan stasiun. Melalui penyusunan rencana induk pengembangan transportasi perkeretaapian.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara di wilayah Kabupaten
- Pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Sungai Tebelian terdiri dari sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
 - Pengembangan bandar udara baru untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai (daerah terpencil) dan Kecamatan Ketungau Hulu, (kawasan perbatasan) terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
 - Pengembangan *Heliport* di Desa Kecamatan Ketungau Hulu
5. Perwujudan Sistem Jaringan Energi di wilayah Kabupaten
- Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Menyurai di Kecamatan Sintang dengan kapasitas 7 MW;
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu dengan kapasitas 373 kW;
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Lebang di Kecamatan Kelam Permai dengan kapasitas 218 kW;
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir dengan kapasitas 250 kW
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah dengan kapasitas 786 kW.
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu dengan kapasitas 415 kW.
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Sinar Pekayau di Kecamatan Sepauk dengan kapasitas 464 kW.
 - Pemeliharaan dan pemantapan pelayanan pembangkit tenaga listrik pada PLTD Serawai dan Ambalau dibawah pengelolaan PLN rayon Melawi dengan kapasitas kW.
 - Pengembangan PLTU di Kawasan Industri Sungai Ringin dengan kapasitas 21 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau dengan kapasitas kurang lebih 15 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Kayan Hulu terdapat di Air Terjun Sahai Nebias dengan potensi 14,2664 Kw; Air Terjun Pancur Perabung dengan potensi 19,6412 Kw; Air Terjun Cahai Sintot dengan potensi 30,5539 Kw; Air Terjun Cahai Telanjin dengan potensi 18,7630 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Sepauk terdapat di Air Terjun Tuja Plaboh Ayau dengan potensi 13, 1010 Kw; Air Terjun Tuja Tinggi dengan potensi 9, 7273 Kw; Air Terjun Tuja Tiga Tingkat dengan potensi 81, 0587 Kw; Air Terjun Sungai Kenubuh Induk dengan potensi 55, 8334 Kw; Air Terjun Sungai Mengirang dengan potensi 56,5523 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Ketungau Hulu terdapat di Air Terjun Sungai Telaga dengan potensi 13,8188 Kw; Air Terjun Sungai Benyawai dengan potensi 138, 6030 Kw; Air Terjun Sungai Lipat dengan potensi 26,7714 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Tempunak terdapat di Air Terjun Sungai Kujau dengan potensi 19,6431 Kw terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan PLTMH di Kecamatan Ambalau terdapat di Air Terjun Noka Nayan dengan potensi 15 MW terdiri dari kegiatan feasibility studi, sosialisasi, pengembangan DED, pembebasan lahan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan.
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas kurang lebih bervariasi dari 5 kWP - 1 MWP MW terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu pada desa-desa Desa Sebetung Paluk; Sungai Bugau; dan Sungai Seria.
- Pengembangan PLTS di Kecamatan Ketungau Tengah pada desa-desa Panding Jaya; Begelang Jaya; Wirayuda; Wana Bhakti; Semareh; Nanga Kelapan; Raden Jaya.
- Pengembangan PLTS di Kecamatan Ketungau Hilir Nanga Ketungau; Jentawang; Beloh Mulyo; Nanga Sejirak; Sungai Mali; Pampang Dua; Mungguk Kelapa.
- Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri dari:
 - 1) Isolated kecamatan PLTD kecil di Senaning

- 2) Gardu Induk (GI) di Sungai Ringin;
 - 3) Gardu Trafo (GT) dengan jumlah 461 buah;
 - 4) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di kota Sintang;
 - 5) Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan panjang saluran 749,468 kms;
 - 6) Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan panjang saluran 656,89 kms.
6. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di wilayah Kabupaten
- Pemeliharaan dan perluasan pelayanan jaringan terestrial sistem kabel terutama di pusat-pusat kegiatan baik PKW, PKSN, PKL, PPK, PPL maupun Kawasan Perdesaan.
 - Perluasan pelayanan jaringan terestrial nirkabel ke seluruh wilayah Kabupaten Sintang terutama pada kawasan *blankspot*.
 - Penataan lokasi menara-menara tower telekomunikasi untuk pelayanan jaringan terestrial.
 - Pengembangan jaringan satelit terutama pada kawasan terpencil dan terisolasi.
 - Pengembangan jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten.
 - Pengembangan jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
7. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten
- Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi.
 - Pengembangan waduk-waduk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum.
 - Peningkatan dan pemerataan pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
 - Pengembangan sistem penyediaan air minum pada kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku.
 - Pemantapan dan Pengembangan Wilayah Sungai (WS) berupa Wilayah Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dengan sub DAS Kapuas dan DAS Melawi.
 - Pemantapan dan Pengembangan Daerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi dan irigasi desa;
 - Pemantapan dan Pengembangan Bendung/embung, yang meliputi:
 - 1) Bendung untuk kebutuhan air baku dan tenaga listrik di Kabupaten Sintang
 - 2) Embung untuk kebutuhan air baku dan pengairan irigasi di Kabupaten Sintang
 - Pemantapan dan Pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi:
 - 1) Irigasi Permukaan yang tersebar di Kabupaten Sintang
 - 2) Irigasi Rawa Lebak yang tersebar di Kabupaten Sintang
 - Pemantapan dan Pengembangan Irigasi Desa (ID) meliputi Irigasi Desa yang tersebar di Kabupaten Sintang.

- Pemantapan dan Pengembangan Sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai terdiri atas:
 - 1) perlindungan daerah tangkapan air (Hulu DAS yang ada di seluruh kecamatan);
 - 2) normalisasi sungai;
 - 3) perbaikan drainase;
 - 4) pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor;
 - 5) pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir; dan
 - 6) revitalisasi Sungai atau danau atau mata air.
- 8. Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan di wilayah Kabupaten

Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

- Peningkatan sistem pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) terdapat di Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir; Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk; Nanga Serawai Kecamatan Serawai; dan Jerora Kecamatan Sintang dengan sistem *controlled landfill/sanitary landfill*;
- pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Nanga Kemangai untuk melayani Kecamatan Ambalau; Nanga Tebidah untuk melayani Kecamatan Kayan Hulu; Nanga Tempunak untuk melayani Kecamatan Tempunak; Sungai Ukoi untuk melayani Kecamatan Sungai Tebelian; Nanga Dedai untuk melayani Kecamatan Dedai; Kebong untuk melayani Kecamatan Kelam Permai; Binjai untuk melayani Kecamatan Binjai Hulu; Nanga Ketungau untuk melayani Kecamatan Ketungau Hilir; Senaning untuk melayani Kecamatan Ketungau Hulu; dan Merakai untuk melayani Kecamatan Ketungau Tengah.
- pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan sistem 3 R (reduce, reuse, dan recycle) di Nanga Serawai Kecamatan Serawai; Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir; Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk; Nanga Merakai Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Sintang.

Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah

- pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
- pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Kecamatan Sintang; didorong untuk pengembangan IPLT yang menghasilkan energi alternatif.
- pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada permukiman-permukiman di ibukota-ibukota kecamatan dan fasilitas kesehatan.

Sistem Jaringan Drainase

- pengembangan jaringan drainase primer di kota Sintang sebagai ibukota kabupaten berupa sungai – sungai/saluran air yang bermuara ke sungai Kapuas;
- pengembangan jaringan drainase sekunder berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam kota; dan
- pengembangan jaringan drainase tersier berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam lingkungan permukiman.
- pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier di ibukota-ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Sistem Penyediaan Jaringan Air Minum

- Pemantapan Sumber mata air (SMA) di Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 5 l/d;
- Pemantapan Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 80 l/d terdapat di unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 55 l/d, Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit 10 l/d, Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d, Unit PDAM Tempunak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dari Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 70 l/d terdapat di unit PDAM Sungai Ana dengan debit kurang lebih 40 l/d; unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 30 l/d.
- Rencana pengembangan jaringan air minum yang meliputi:
 - 1) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 65 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut:
 - a. Unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 20 l/d;
 - b. Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d;
 - c. Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit kurang lebih 20 l/d; dan
 - d. Unit PDAM Binjai dengan debit kurang lebih 20 l/d;
 - 2) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 40 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut:
 - a. Unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 20 l/d;
 - b. Unit PDAM Nanga Jetak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
 - c. Unit PDAM Nanga Serawai dengan debit kurang lebih 10 l/d;
 - 3) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Ketungau dengan debit kurang lebih 50 l/d dikembangkan di beberapa unit PDAM sebagai berikut:
 - a. Unit PDAM Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 15 l/d;

- b. Unit PDAM Mengkurai dengan debit kurang lebih 25 l/d;
- c. Unit PDAM Senaning dengan debit kurang lebih 10 l/d;
- 4) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kayan dikembangkan di unit PDAM Nanga Mau dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
- 5) Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Tebidah dikembangkan di unit PDAM Nanga Tebidah dengan debit kurang lebih 10 l/d.
- 6) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) minum terdapat di Unit PDAM Sungai Ana dengan debit menjadi 120 l/d.

Jalur Evakuasi Bencana

- Pemantapan dan pengembangan jalur evakuasi bencana dengan mengikuti ruas jalan yang ada menuju daerah yang aman.
- Pengembangan sistem pengaman bencana sebagai upaya preventif pemerintah daerah guna mewujudkan rasa aman bagi warganya.

7.3.2. Pembentukan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

A. Perwujudan Kawasan Lindung

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

a1. Perwujudan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.

- Kawasan Hutan Lindung
 - Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan lindung di beberapa kawasan berikut:
 - 1) Gunung Rentap terdapat di Kecamatan Kelam Permai;
 - 2) Bukit Temara Untau terdapat di Kecamatan Ambalau;
 - 3) Bukit Tujun terdapat di Kecamatan Ambalau;
 - 4) Gunung Kuhjau terdapat di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;
 - 5) Liyang Kukang terdapat di Kecamatan; Ambalau
 - 6) Gunung Kumaha terdapat di Kecamatan; Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
 - 7) Bukit Sasar terdapat di Kecamatan; Serawai dan Ambalau
 - 8) Bukit Condong terdapat di Kecamatan; Sepauk dan Tempunak
 - 9) Gunung Betung-Kenapai terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 10) Pangihan-Lambuanak terdapat di Kecamatan Ambalau;
 - 11) Sungai Kiyungkang terdapat di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;

- 12) Kumbu terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - 13) Bukit Perigi terdapat di Kecamatan Ambalau dan Kayan Hulu;
 - 14) Bukit Alat-Sungai Demu terdapat di Kecamatan Serawai, Ambalau dan Kayan Hulu
 - 15) Gunung Bang terdapat di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir;
 - 16) Nyamban Pangihan terdapat di Kecamatan Ambalau;
 - 17) Bukit Mencaya terdapat di Kecamatan Ambalau;
 - 18) Gunung Luit terdapat di Kecamatan Kelam Permai;
DAN
 - 19) Bukit Durian terdapat di Kecamatan Ambalau.
- Konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung.
 - Kawasan Resapan Air
 - Penetapan dan pemantapan kawasan resapan air.
 - Perlindungan dan penertiban kawasan resapan air
 - Kawasan Bergambut
 - Penetapan dan pemantapan kawasan bergambut.
 - Perlindungan dan penertiban kawasan bergambut.
 - Konservasi dan rehabilitasi kawasan bergambut.

a2. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat

- Kawasan Sempadan Sungai
 - Penetapan sempadan sungai di seluruh Kabupaten Sintang.
 - Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan sungai.
 - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan sungai.
 - Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan sungai.
- Kawasan Sempadan Danau/Embung
 - Penetapan sempadan danau/embung di seluruh Kabupaten Sintang.
 - Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan danau/embung.
 - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan danau/embung.
 - Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan danau/embung.
- Kawasan Sempadan Danau Paparan Banjir
 - Penetapan sempadan danau paparan banjir di seluruh Kabupaten Sintang.
 - Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan danau paparan banjir.
 - Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan danau paparan banjir.
 - Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan danau paparan banjir.
- Kawasan Sempadan Mata Air

- Penetapan sempadan mata air di seluruh Kabupaten Sintang.
- Penegasan deliniasi dan aturan zonasi sempadan mata air.
- Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan sempadan mata air.
- Perlindungan dan penertiban secara bertahap kawasan sempadan mata air.
- Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Pengembangan Masterplan RTHK yang terintegrasi dalam RDTR pada seluruh kawasan perkotaan (PKW, PKSN, PKL, PPK).
 - Pengembangan RTHK minimal 30% pada PKW dan PKSN, 40% pada PKL dan 50% pada PPK dari total luasan wilayah.

a3. Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

- Penegasan batas Kawasan, Zonasi blok inti, blok rimba atau blok pemanfaatan untuk Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Baning.
- Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan.
- Konservasi dan rehabilitasi kawasan.
- Studi dan Inventarisasi Ekosistem pada Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya, Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Taman Wisata Alam Baning.
- Perlindungan terhadap potensi sumber daya hayati, nilai arkeologi historis khusus dan nilai spiritual adat lokal.
- Inventarisasi, Pemetaan kondisi, konservasi dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

a4. Perwujudan Kawasan Rawan Bencana Alam

- Pengembangan peraturan zonasi.
- Identifikasi kawasan rawan bencana alam.
- Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah.
- Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan rawan bencana alam.
- Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana.
- Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal.

a5. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi

- Identifikasi kawasan lindung geologi yang merupakan cekungan air tanah.
- Pengembangan pengaturan pemanfaatan air tanah.
- Penyebaran informasi (sosialisasi) kawasan lindung geologi.
- Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan lindung geologi.
- Peningkatan kapasitas adaptasi kawasan melalui kearifan lokal.

a6. Perwujudan Kawasan Lindung Lainnya

- Identifikasi kondisi plasma nutfah pada kawasan lindung.
- Penetapan dan penegasan batas kawasan koridor satwa di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.
- Pengembangan RTR Kawasan Koridor Satwa.
- Perlindungan flora dan fauna khas wilayah.

B. Perwujudan Kawasan Budidaya

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari:

b1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT)
 - Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi terbatas yang terdapat di beberapa kawasan berikut:
 - 1) HPT Kainjal terletak di Kecamatan Tempunak
 - 2) HPT Sungai Ketungau Hulu terletak di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - 3) HPT Sungai Serawai terletak di Kecamatan Serawai; dan
 - 4) HPT Uluk Ubur terletak di Kecamatan Kelam Permai dan Kayan Hilir
 - Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
 - Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- Kawasan Hutan Produksi (HP)
 - Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi yang terdapat di beberapa kawasan berikut:
 - 1) HP Dinding Raja, terletak di Kecamatan Dedai, Kayan Hilir dan Kayan Hulu
 - 2) HP Keninjal, terletak di Kecamatan Tempunak dan Sui Tebelian
 - 3) HP Nanga Mengkilau, terletak di Kecamatan Serawai
 - 4) HP Sungai Kembayan-Sungai Mengkiang, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
 - 5) HP Sungai Sekapak-Kenapai, terletak di Kecamatan Ketungau Tengah
 - 6) HP Bukit Condong, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir
 - 7) HP Bukit Pelantar, terletak di Kecamatan Kayan Hilir
 - 8) HP Ginsar, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah
 - 9) HP Keruab Melawi, terletak di Kecamatan Serawai
 - 10) HP Sungai Jungkit, terletak di Kecamatan Ketungau Hilir, Binjai Hulu dan Sepauk
 - Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
 - Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.
- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)

- Pemetaan luas dan kondisi kawasan hutan produksi konversi yang terdapat di HPK Gunung Kemuha terletak di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah
- Pengembangan komoditas kayu dan non kayu penunjang industri kerajinan dan industri lainnya.
- Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.

b2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian

- Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
 - Pemetaan lokasi dan luasan pertanian tanaman pangan
 - Penyepakatan pengembangan lahan pertanian abadi berkelanjutan yang potensinya terdapat di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
 - Intensifikasi lahan pertanian
 - Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
 - Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis
- Kawasan Pertanian Hortikultura
 - Pemetaan lokasi dan luasan pertanian hortikultura
 - Pengembangan komoditas hortikultura produktif dan unggulan.
 - Intensifikasi lahan pertanian
 - Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
 - Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis
- Kawasan Perkebunan
 - Pemetaan lokasi dan luasan kawasan peruntukan perkebunan
 - Pemetaan komoditas perkebunan produktif dan unggulan
 - Pengembangan indikasi geografis bagi komoditas khas
 - Intensifikasi lahan pertanian
 - Pengembangan secara bertahap pertanian organik.
 - Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis
 - Pengembangan kemitraan dengan industri
- Kawasan Peternakan
 - Pemantapan pasar-pasar khusus peternakan/Pasar Hewan Wilayah
 - Mengintegrasikan kegiatan peternakan dengan pertanian dan permukiman.
 - Penetapan klasifikasi jenis ternak yang sesuai potensi wilayah adalah sebagai berikut:
 - 1) Jenis Ternak Besar terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
 - a) Kecamatan Binjai Hulu;
 - b) Kecamatan Tempunak;
 - c) Kecamatan Sungai Tebelian; dan
 - d) Kecamatan Ketungau Hulu.
 - 2) Jenis Ternak Kecil terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
 - a) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - b) Kecamatan Serawai;

- c) Kecamatan Kayan Hulu;
 - d) Kecamatan Binjai Hulu;
 - e) Kecamatan Tempunak; dan
 - f) Kecamatan Sungai Tebelian
- 3) Jenis Ternak Unggas terdapat di kecamatan-kecamatan berikut:
- a) Kecamatan Sungai Tebelian;
 - b) Kecamatan Sintang;
 - c) Kecamatan Kelam Permai;
 - d) Kecamatan Binjai Hulu; dan
 - e) Kecamatan Tempunak.

b3. Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan

- Pemetaan lokasi kegiatan perikanan darat, yang meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan.

- 1) Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Sintang terdapat di beberapa sungai, sebagai berikut:
- a) Sungai Kapuas di Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sintang, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Ketungau Hilir
 - b) Sungai Melawi di Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Kayan Hilir
 - c) Sungai Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu
 - d) Sungai Kayan di Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu
 - e) Sungai Serawai di Kecamatan Serawai
 - f) Sungai Ambalau di Kecamatan Ambalau
- 2) Potensi budidaya perikanan, terdapat tiga kategori yaitu budidaya perikanan umum daratan di sungai; di danau dan di kolam budidaya. Secara rinci penetapan potensi tersebut meliputi:

Budidaya perikanan umum daratan di sungai-sungai terdapat di:

- a) Sungai Kapuas;
- b) Sungai Melawi;
- c) Sungai Ketungau;
- d) Sungai Kayan;
- e) Sungai Serawai; dan
- f) Sungai Ambalau.

Budidaya perikanan umum daratan di danau-danau terdapat di:

- a) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
- b) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
- c) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
- d) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
- e) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
- f) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
- g) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
- h) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;

- i) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan
- j) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;

**Budidaya perikanan umum daratan di kolam
budidaya terdapat di:**

- a) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - b) Kecamatan Kayan Hilir;
 - c) Kecamatan Dedai;
 - d) Kecamatan Sintang; dan
 - e) Kecamatan Tempunak.
- 3) Potensi kawasan pengolahan ikan, meliputi kawasan-kawasan berikut:

Pengolahan hasil perikanan tangkap berupa Unit Pendaratan, Pemasaran dan Pelelangan Ikanditetapkan di:

- a) Kecamatan Ketungau Tengah;
- b) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
- c) Kecamatan Sintang

Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di:

- a) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
- b) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
- c) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
- d) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai Hulu;
- e) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
- f) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
- g) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
- h) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
- i) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan
- j) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu

- Rencana pengembangan Sentra Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap & Perikanan Budidaya di:
 - 1) Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 2) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
 - 3) Kecamatan Sintang.
- Pengaturan zonasi kawasan perikanan tradisional, perikanan tangkap dan lokasi pengolahan hasil perikanan.
- Pemantapan fasilitas pendukung: Pelabuhan/Dermaga ikan, PPI dan TPI

b4. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan

- Pemetaan potensi bahan tambang
- Pengembangan Peraturan Zonasi Kawasan yang memiliki Potensi Galian
- Pengendalian pemanfaatan ruang
- Konservasi dan rehabilitasi kawasan pasca penambangan
- Penetapan kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari: Wilayah Pencadangan Negara (WPN); Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara; Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam; Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam; Kawasan Peruntukan

Pertambangan Radio aktif; Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan.

- 1) Kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), meliputi:
 - a) Kecamatan Serawai; dan
 - b) Kecamatan Ambalau.
- 2) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batubara, meliputi:
 - a) Kecamatan Ketungau Hulu;
 - b) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - c) Kecamatan Ketungau Tengah;
 - d) Kecamatan Kayan Hilir;
 - e) Kecamatan Kayan Hulu;
 - f) Kecamatan Serawai; dan
 - g) Kecamatan Ambalau.
- 3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam, meliputi:
 - a) Kecamatan Ketungau Tengah;
 - b) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - c) Kecamatan Binjai;
 - d) Kecamatan Sepauk;
 - e) Kecamatan Tempunak;
 - f) Kecamatan Sungai Tebelian;
 - g) Kecamatan Sintang;
 - h) Kecamatan Kelam Permai;
 - i) Kecamatan Dedai;
 - j) Kecamatan Kayan Hilir;
 - k) Kecamatan Kayan Hulu;
 - l) Kecamatan Serawai; dan
 - m) Kecamatan Ambalau.
- 4) Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam, meliputi: Kecamatan Ambalau.
- 5) Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif, meliputi:
 - a) Kecamatan Ketungau hilir;
 - b) Kecamatan Binjai Hulu;
 - c) Kecamatan Sepauk;
 - d) Kecamatan Kelam Permai;
 - e) Kecamatan Kayan Hilir;
 - f) Kecamatan Kayan Hulu;
 - g) Kecamatan Serawai; dan
 - h) Kecamatan Ambalau.
- 6) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan, meliputi:
 - a) Kecamatan Dedai;
 - b) Kecamatan Sei Tebelian;
 - c) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - d) Kecamatan Kelam Permai;
 - e) Kecamatan Binjai Hulu;
 - f) Kecamatan Sintang;
 - g) Kecamatan Tempunak;
 - h) Kecamatan Sepauk; dan

i) Kecamatan Serawai.

b5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri

- Pengembangan Rencana Induk Kegiatan Perindustrian Daerah
- Integrasi kegiatan industri kecil bercampur secara sinergi dengan permukiman.
- Pengendalian Kegiatan Usaha Perindustrian
- Perlindungan kawasan sekitar kegiatan perindustrian.
- Penetapan peruntukan kawasan industri terdiri atas: peruntukan industri besar, sedang dan rumah tangga.
 - 1) Kawasan peruntukan industri besar antara lain meliputi:
 - a) Industri Pengolahan Karet, terdapat di Kecamatan
 - b) Industri Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), terdapat di Kecamatan
 - c) Industri crumb rubber, terdapat di Kecamatan
 - d) Industri CPO, terdapat di Kecamatan
 - e) Industri Kernel (Inti Sawit), terdapat di Kecamatan
 - 2) Kawasan peruntukan industri sedang meliputi: Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Sungai Ringin, yang meliputi kegiatan:
 - a) Pengembangan dan penetapan RTR Kawasan Industri Sungai Ringin.
 - b) Pengembangan infrastruktur penunjang.
 - c) Pengembangan insentif
 - d) Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat dan disinsentif.
 - 3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain meliputi:
 - a) Industri Kecil Menengah (IKM) **pangan** berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - (1) Kecamatan Sintang;
 - (2) Kecamatan Tempunak;
 - (3) Kecamatan Sungai Tebelian;
 - (4) Kecamatan Kelam Permai;
 - (5) Kecamatan Ketungau Tengah;
 - (6) Kecamatan Ambalau;
 - (7) Kecamatan Kayan Hilir;
 - (8) Kecamatan Ketungau Hulu; dan
 - (9) Kecamatan Binjai Hulu.
 - b) Industri Kecil Menengah (IKM) **sandang** berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - (1) Kecamatan Sintang;
 - (2) Kecamatan Dedai; dan
 - (3) Kecamatan Kelam Permai;
 - c) Industri Kecil Menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sintang;
 - d) Industri Kecil Menengah (IKM) **logam dan elektronik** berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - (1) Kecamatan Sintang;
 - (2) Kecamatan Serawai;
 - (3) Kecamatan Ambalau;
 - (4) Kecamatan Tempunak;

- (5) Kecamatan Dedai; dan
 - (6) Kecamatan Kelam Permai.
 - e) Industri Kecil Menengah (IKM) kerajinan berpotensi ditempatkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - (1) Kecamatan Sintang;
 - (2) Kecamatan Kelam Permai;
 - (3) Kecamatan Tempunak;
 - (4) Kecamatan Kayan Hulu;
 - (5) Kecamatan Sepauk;
 - (6) Kecamatan Ketungau Hilir;
 - (7) Kecamatan Ketungau Tengah; dan
 - (8) Kecamatan Ketungau Hulu.
 - Penetapan pengembangan kawasan industri berciri khusus yang potensinya terdapat beberapa komoditi, dikembangkan di kecamatan-kecamatan berikut:
 - 1) Tenun Ikat, dikembangkan di:
 - a) Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
 - b) Desa Umin di Kecamatan Dedai;
 - c) Desa Sungai Buaya di Kecamatan Kayan Hilir.
 - 2) Rotan, dikembangkan di:
 - a) Desa-desanya Mentajoi (pusat), Merako, Riyoi, Tangoi, Ruhan, Sawang Sengiang di Kecamatan Serawai; dan
 - b) Desa-desanya Sake, Kesange, Menantak, Menakon, Buntut Sabun (sentra/pusat), Buntut Purun (dengan kelompok pengrajin) di Kecamatan Ambalau.
 - 3) Industri Komoditi Lainnya.
- b6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Pengembangan/pemantapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
 - Perwujudan Kawasan Pariwisata
 - ✓ Pengembangan dan penetapan RTR Kawasan Pariwisata
 - ✓ Penetapan Peraturan Zonasi
 - ✓ Pembangunan infrastruktur penunjang sesuai RTR
 - ✓ Pengembangan kriteria akomodasi untuk kawasan pariwisata.
 - ✓ Pengembangan insentif dan disinsentif.
 - ✓ Pengelolaan lahan terlantar / lahan tidur.
 - ✓ Pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.
 - Perwujudan Daerah Tujuan Wisata Kabupaten
 - ✓ Identifikasi potensi dan luasan efektif dan peraturan zonasi.
 - ✓ Pengembangan pariwisata kerakyatan dan ekowisata.
 - Penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi: wisata budaya; wisata religi; pariwisata alam dan pariwisata buatan.
 - ✓ Kawasan peruntukan pariwisata budaya, antara lain terdiri atas:
 - 1) Rumah Adat Betang di desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai;
 - 2) Rumah Adat Betang Panjang di desa Kayu Duyung Kecamatan Ketungau Tengah.

- 3) Museum Keraton Al Mukoromah di kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang;
- 4) Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang;
- 5) Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi di Kecamatan Sintang.
- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata religi, terdiri atas: Goa Maria di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai.
- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
 - 1) Wisata Hutan, meliputi:
 - a) Wisata Baning di Kecamatan Sintang;
 - b) Taman Wisata Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - c) Hutan Tawang Mersibung di Kecamatan Kelam Permai.
 - 2) Wisata Bukit, antara lain terdapat di:
 - a) Bukit Luit di Kecamatan Kelam Permai;
 - b) Bukit Kujau di Kecamatan Sepauk dan Tempunak;
 - c) Bukit Saran di Kecamatan Sepauk;
 - d) Bukit Bang di Kecamatan Kayan Hilir;
 - e) Bukit Ruyung di Kecamatan Kayan Hilir;
 - f) Bukit Gonik di Kecamatan Kayan Hilir;
 - g) Bukit Bungau di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - h) Bukit Bejaku di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - i) Bukit Sahai Keladan di Kecamatan Kayan Hulu; dan
 - j) Bukit Rentapdi Kecamatan Kelam Permai.
 - 3) Wisata Danau Dan Telaga, antara lain terdapat di:
 - a) Danau Jemelak di Kecamatan Sintang;
 - b) Telaga Rendang di Kecamatan Kelam Permai;
 - c) Telaga Telaga Surat di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - d) Telaga Kumangdi Kecamatan Ketungau Hulu;
 - 4) Kawasan Wisata Sungai Dan Riam antara lain terdapat di:
 - a) Sungai Silitdi Kecamatan Sepauk;
 - b) Sungai Kiara di Kecamatan Sepauk;
 - c) Sungai Lubuk Kembang di Kecamatan Sepauk;
 - d) Sungai Kura di Kecamatan Kayan Hilir;
 - e) Sungai Beribijit di Kecamatan Kayan Hilir;
 - f) Sungai Kelampai di Kecamatan Kayan Hilir;
 - g) Sungai Kujau di Kecamatan Tempunak;
 - h) Sungai Senirah di Kecamatan Tempunak;
 - i) Riam Capat Cunai di Kecamatan Tempunak;
 - j) Riam Setungkup di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - k) Riam Pengundang di Kecamatan Serawai; dan
 - l) Riam Mensabu di Kecamatan Kayan Hulu.
 - 5) Wisata Air Terjun antara lain terdapat di:
 - a) Air Terjun Nokan Nayan di Kecamatan Ambalau;
 - b) Air Terjun Nokan Cecak di Kecamatan Ambalau;
 - c) Air Terjun Nokan Undak di Kecamatan Ambalau;
 - d) Air Terjun Nokan Jenggonoi di Kecamatan Ambalau;
 - e) Air Terjun Sentarum di Kecamatan Sepauk;

- f) Air Terjun Tuja Pamak di Kecamatan Sepauk;
 - g) Air Terjun anak Sungai Sentarum di Kecamatan Sepauk;
 - h) Air Terjun Tuja Supit di Kecamatan Sepauk;
 - i) Air Terjun Tuja Tapang Tuai di Kecamatan Sepauk;
 - j) Air Terjun Sarai Entemu di Kecamatan Kayan Hilir;
 - k) Air Terjun Sarai Nantai Bulung di Kecamatan Kayan Hilir;
 - l) Air Terjun Bukit Kujau di Kecamatan Tempunak;
 - m) Air Terjun Gurung Jatuk di Kecamatan Tempunak;
 - n) Air Terjun Sungai Jerup di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - o) Air Terjun Sungai Udang di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - p) Air Terjun Wong Sepakat di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - q) Air Terjun Wong Tapah di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - r) Air Terjun Tekop di Kecamatan Ketungau Tengah; dan
 - s) Air Terjun Wong Tungku di Kecamatan Ketungau Tengah.
- 6) Wisata Gua antara lain terdapat di:
- a) Gua Paleh Beranidi Kecamatan Kayan Hilir;
 - b) Gua Paleh Pengolak di Kecamatan Kayan Hilir;
 - c) Gua Antu Simpak di Kecamatan Kelam Permai;
 - d) Gua Gemelat di Kecamatan Kelam Permai; dan
 - e) Gurung Jeruk di Kecamatan Tempunak.
- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas:
- 1) kawasan wisata Galery Motor Bandong di Desa Jerora Kecamatan Sintang.
 - 2) Kawasan Wisata Kolam Renang antara lain terdapat di:
 - a) Kolam Renang Serantung Waterpark di Kecamatan Sintang;
 - b) Kolam Renang Balioboro di Kecamatan Sintang;
 - c) Kolam Renang Tebelian Indah di Kecamatan Sei Tebelian; dan
 - d) Kolam Renang Tirta Wisata Kelam di Kecamatan Kelam permai;
 - 3) Kawasan Wisata Out Bond Sake di Kecamatan Sintang;
 - 4) Kawasan Wisata Paralayang, Panjat Tebing, Sepeda Gunung di Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai.

b7. Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman

- Pengembangan dan penetapan RTR pada berbagai tingkatan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota beserta Peraturan Zonasi.

- ✓ Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jaringan prasarana permukiman (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase) di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan) di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana: pengendalian banjir, pengamanan bantaran sungai dan lain-lain di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Perwujudan ruang terbuka hijau 30% dari wilayah kota di semua ibu kota Kecamatan.
- ✓ Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana di semua ibu kota Kecamatan.
- Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - ✓ Pengembangan agropolitan yang meliputi kecamatan-kecamatan:
 - 1) Kecamatan Kayan Hilir,
 - 2) Kecamatan Dedai, dan
 - 3) Kecamatan Sungai Tebelian
 - ✓ Penetapan dan pemantapan status permukiman perdesaan pada desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
 - ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sistem jaringan prasarana permukiman skala perdesaan (jalan, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase) di seluruh Kecamatan.
 - ✓ Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman pada skala perdesaan (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, dan kebudayaan) di seluruh Kecamatan.
 - ✓ Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana: pengendalian banjir, pengamanan bantaran sungai dan lain-lain di seluruh Kecamatan.
 - ✓ Perlindungan terhadap sawah beririgasi di seluruh Kecamatan.

b8. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lainnya

- Penetapan fungsi-fungsi peruntukan lain, yang meliputi:
 - ✓ Polres dan Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Sintang;
 - ✓ Pelsek dan Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di 13 Kecamatan selain Kecamatan Sintang.
- Pemetaan lokasi fungsi peruntukan lain
- Pengembangan prasarana pendukung fungsi peruntukan lain.

- Pengembangan sarana pendukung fungsi peruntukan lain.

7.3.3. Pembentukan Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten

Perwujudan rencana kawasan strategis di Kabupaten Sintang, terdiri atas : kawasan strategis nasional, propinsi dan kabupaten.

- A. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Nasional, meliputi :
 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan terdapat di Kawasan Jasa Kecamatan Ketungau Hulu;
 2. Kawasan Jantung Kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdapat di kecamatan-kecamatan :
 - a. Kecamatan Serawai
 - b. Kecamatan Ambalau
- B. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Propinsi dengan sektor unggulan batu bara, terdapat di kecamatan-kecamatan :
 1. Kecamatan Ketungau Hulu;
 2. Kecamatan Ketungau Hilir;
 3. Kecamatan Ketungau Tengah;
 4. Kecamatan Kayan Hilir;
 5. Kecamatan Kayan Hulu;
 6. Kecamatan Serawai; dan
 7. Kecamatan Ambalau.
- C. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi kawasan strategis dengan berbagai sudut kepentingan sebagai berikut :
 1. Sudut Kepentingan Ekonomi; ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Sepauk;
 - b. Pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Tempunak
 - c. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kayan Hilir;
 - d. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Dedai, dan
 - e. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sungai Tebelian.
 2. Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan pada kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama yang mencakup wilayah kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Ambalau; dan
 - b. Kecamatan Serawai
 3. Sudut Kepentingan Pariwisata, meliputi :
 - a. Kawasan Sintang – Banning terdapat di Kecamatan Sintang;
 - b. Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) terdapat di Kecamatan Kelam Permai;
 - c. Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata TN Bukit Baka Bukit Raya terdapat di Kecamatan Serawai.